

Operasi Pasar Murah PT. Pos Indonesia: Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Bulan Ramadhan

Dedek Jihan Nasution, Fajar Utama Ritonga

Social Welfare Program Study Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Correspondence e-mail; dedekjihana@students.usu.ac.id, fajar.utama@usu.ac.id

Article history

Submitted: 2025/02/01; Revised: 2025/03/11; Accepted: 2025/05/28

Abstract

This research examines the implementation of the subsidized market operation program conducted by PT. Pos Indonesia (Persero) in Medan during Ramadan 2025. This program represents a strategic effort to address price fluctuations and ensure the availability of essential goods at affordable prices for the community, especially approaching the holy month of Ramadan and Eid al-Fitr. Using a qualitative approach through observation, in-depth interviews, and documentation studies, this research analyzes the implementation mechanisms, cross-sectoral coordination, and the socio-economic impact of the program on community welfare. The findings indicate that the subsidized market operation has successfully increased community purchasing power, stabilized food prices in the market, and strengthened community social cohesion. The application of the Community Organization Community Development (COCD) intervention method through student volunteer involvement has enhanced the social empowerment dimension of this program. Nevertheless, several challenges were identified in its implementation, such as stock limitations, long queues, and limited coverage. This research recommends expanding program coverage, diversifying commodities, integrating digital services, and developing partnerships with local Small and Medium Enterprises (SMEs) to improve program effectiveness within the welfare state framework as a manifestation of state-owned enterprise social responsibility.

Keywords

Subsidized Market Operation, PT. Pos Indonesia, Community Welfare, Price Stabilization, Welfare State, State-Owned Enterprise



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pasar murah merupakan salah satu program stabilisasi harga pangan yang baru dibentuk pemerintah pada tahun 2017 dengan menunjuk Perum Bulog sebagai salah satu pelaksana program. Pasar murah merupakan kepanjangan tangan dari program operasi pasar (Sunardi et al., 2022). Perbedaannya dengan operasi pasar yaitu pasar

murah dilakukan dengan menjual bahan pangan pokok secara langsung ke konsumen dengan harga di bawah harga pasar atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Tujuan utama dari pasar murah yaitu untuk mengurangi permintaan terhadap pasar sehingga dapat diharapkan harga di pasar dapat turun karena berkurangnya permintaan dan kemudian dapat mengembalikan harga secara umum. Stabilisasi harga melalui pasar murah dapat terjadi apabila pasar murah melakukan intervensi tepat pada waktu (bulan) dimana harga beras naik, seperti pada menjelang hari raya besar keagamaan atau saat musim paceklik. Stabilisasi harga inilah yang menjadi output dari dilaksanakan pasar murah dimana output tersebut dapat tercapai apabila pelaksanaan pasar murah berjalan efektif.

PT. Pos Indonesia, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak hanya berfokus pada layanan logistik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Dewi, 2023; Sjoraida et al., 2025). Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan mengadakan operasi pasar murah, terutama di saat-saat penting seperti bulan Ramadhan. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang cenderung meningkat selama bulan puasa dan menjelang lebaran. Menurut Nurhasanatan, et al. (2023) peran pemerintah selayaknya mengarahkan masyarakat pada kemandirian dan pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran sehingga tidak hanya dibebankan oleh masyarakat. Diperkuat oleh pendapat Sari, V. M., et al. (2021) pemerintah sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan pembangunan perekonomian. Ketersediaan beras yang cukup dan harga yang terjangkau adalah salah satu indikator penting untuk mencapai keamanan pangan dan kesejahteraan sosial (Indriani, 2024).

Konsep welfare state adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya (Hadiyono, 2020). Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan perlindungan pencegahan pada masalah sosial. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan sistem welfare state dengan model minimalis tetap memberikan tunjangan yang sangat minimal juga bagi warga negaranya. Dengan demikian, sudah seharusnya Masyarakat tidak terus-menerus mengandalkan bantuan

tergantung pada pemerintah. Tanggung jawab kesejahteraan pribadi terletak pada masing-masing individu.

Suatu negara yang menerapkan konsep negara welfare state harus mempunyai kebijakan public yang berisikan bantuan, perlindungan, pelayanan, atau pencegahan terhadap problematika sosial, termasuk di bidang bantuan hukum. Sistem ini menuntut tanggung jawab nyata dari Negara dalam mensejahterakan warga negara melalui campur tangan penuh dari penyelenggara pelayanan publik mencakup segala pembangunan di bidang-bidang yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Hal ini dilakukan dengan mengutus negara dengan kewenangannya untuk turut serta dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat sehubungan dengan asas legalitasnya. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu dari tiga fungsi pemerintah yaitu, sebagai penyelenggaraan pembangunan, penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi harus diselenggarakan seimbang sesuai kebutuhan dan keragaman warga Indonesia, kondisi sektoral, dan potensi daerah lainnya yang nantinya suatu pembangunan yang terus berkembang akan membawa suatu kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya kementerian dan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul fitri dimana pasokan permintaan sangat tinggi sehingga harga-harga di pasar naik drastis. Pasar murah digelar di 4.500 gerai kantor pos di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. Program Operasi Pasar adalah suatu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan. Dalam pelaksanaannya, program Operasi Pasar dilakukan oleh unit kementerian dengan menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, baik itu di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya.

Pasar murah digelar bersama dengan kolaborasi antara kementerian dengan pemerintahan merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan dapat berupa memajukan kesejahteraan masyarakat dapat melalui peran pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada publik sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan

sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pelayanan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk upaya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik tersebut merujuk pada Instansi Pemerintah. Instansi pemerintah sendiri merupakan sebutan yang mewakili satuan kerja/satuan organisasi Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah Lainnya yang juga mencakup wilayah pusat dan daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan obyek yang alami, dan peneliti menjadi alat kuncinya dan hasil penelitian lebih menekankan pada gagasan tentang makna dari isi yang diteliti, bukan daripada menggeneralisasi objeknya. Penelitian kualitatif merupakan satu kegiatan untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta dunia nyata, bukan untuk menguji teori atau hipotesis. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Sedangkan teknik pengumpulan data sendiri menggunakan studi kasus karena merupakan pendekatan yang cocok untuk mengeksplorasi implementasi program Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia, studi ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran negara dalam implementasi program bantuan pasar murah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan operasi pasar murah di lokasi kegiatan. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak penyelenggara dari PT. Pos Indonesia Medan, pihak pemerintah yang terlibat, serta masyarakat penerima manfaat program. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-

dokumen terkait pelaksanaan program, termasuk kebijakan, peraturan, dan laporan pelaksanaan kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Operasi Pasar Murah PT. Pos Indonesia di Medan: Pendekatan COCD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, PT. Pos Indonesia bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah dan swasta menyelenggarakan sebuah program sosial bertajuk *Operasi Pasar Murah*. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, tetapi juga menjadi perwujudan konkret peran serta lembaga publik dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang diresmikan oleh Kementerian Pangan pada 24 Februari 2025 dan berlangsung hingga 29 Maret 2025, tepat selama bulan Ramadhan.

Sebagai mahasiswa dari Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, berkesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini. Keterlibatan tidak hanya sebatas menjadi relawan yang membantu teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjalankan fungsi dan peran sebagai calon pekerja sosial, khususnya dalam menerapkan metode intervensi *Community Organization Community Development* (COCD). Pendekatan COCD ini sangat relevan dalam konteks kegiatan pasar murah, karena menekankan pada pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat melalui tindakan kolektif yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Persiapan kegiatan ini dimulai sejak awal Februari 2025, diawali dengan serangkaian rapat koordinasi antara PT. Pos Indonesia dengan mitra-mitra strategis seperti Perum Bulog, Dinas Perdagangan Kota Medan, dan sejumlah pemasok lokal. Koordinasi ini sangat krusial, terutama dalam menentukan jenis komoditas yang akan dijual, jumlah stok, serta harga jual yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat namun tetap memperhatikan keberlangsungan rantai pasok. Menurut Indartono dan Zein (2022), keberhasilan suatu program sosial sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas sektoral (Apriani et al., 2022). Hal ini tampak dalam kegiatan ini melalui rapat evaluasi mingguan antara PT. Pos Indonesia dan para mitra, yang tidak hanya membahas kendala teknis tetapi juga mencari solusi bersama demi optimalisasi program.

Pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah dipusatkan di Kantor Pos Pusat Kota Medan yang terletak di depan Lapangan Merdeka, lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Tempat ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kapasitas untuk menampung kerumunan, serta fasilitas pendukung seperti area parkir dan toilet umum. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dirancang dengan sangat hati-hati, salah satunya adalah dengan mewajibkan setiap pembeli menunjukkan KTP asli sebagai bukti domisili dan untuk menghindari adanya praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Setiap orang hanya diizinkan membeli sejumlah terbatas, misalnya maksimal 10 kg beras per KTP, sebagai wujud penerapan prinsip keadilan distributif seperti yang dikemukakan oleh Ramadhan (2023). Kegiatan ini berlangsung setiap hari dari pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Sistem antrean diterapkan untuk mencegah terjadinya penumpukan massa. dan rekan-rekan dari berbagai universitas di Medan yang turut menjadi relawan diarahkan untuk membantu proses antrean, validasi data, distribusi barang, serta edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan tujuan program. Pengalaman ini menjadi laboratorium nyata bagi untuk menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial, khususnya dalam pendekatan COCD yang selama ini hanya pelajari secara teoritis di kelas.

Pendekatan COCD yang terapkan dalam kegiatan ini mengikuti tahapan umum intervensi komunitas, dimulai dari tahap *Engagement* atau pelibatan masyarakat. membangun hubungan dan menciptakan kepercayaan dengan warga yang hadir. menyapa mereka, menjelaskan tujuan kegiatan, serta mendengarkan masukan dan harapan mereka. Komunikasi dua arah ini penting untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap program di kalangan masyarakat.

Selanjutnya adalah tahap *Assessment* atau penilaian kebutuhan. melakukan pengamatan langsung, berdiskusi dengan masyarakat, dan mencatat sejumlah informasi penting seperti daya beli, tantangan dalam memenuhi kebutuhan pokok, dan kondisi ekonomi selama bulan Ramadhan. Dari *assessment* ini kami menyadari bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya program pasar murah karena harga bahan pokok di pasaran melonjak menjelang Hari Raya. Tahap berikutnya adalah *Planning* atau perencanaan, di mana bersama tim relawan dan penyelenggara merancang strategi pelaksanaan yang paling efektif. Kami menyusun sistem antrean yang efisien, memperhitungkan waktu layanan, serta membuat skema distribusi yang memastikan bahwa semua pengunjung mendapatkan kesempatan yang adil.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini sangat kami dorong agar mereka merasa menjadi bagian dari solusi.

Tahap keempat adalah *Implementation* atau pelaksanaan. Dalam tahap ini tidak hanya menjadi relawan teknis, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang mendorong masyarakat untuk saling membantu, menjaga ketertiban, dan memahami nilai-nilai solidaritas sosial. Tidak jarang membantu para lansia atau ibu hamil untuk mendapatkan barang dengan lebih mudah, sambil mengedukasi warga tentang pentingnya kebersamaan dan empati sosial. Terakhir adalah tahap *Evaluation* atau evaluasi. Setiap hari kami membuat catatan harian mengenai jumlah pengunjung, dinamika yang terjadi, serta kendala-kendala teknis yang muncul. Masukan dari masyarakat juga kami tampung dan sampaikan dalam rapat evaluasi mingguan. Salah satu masukan yang sering muncul adalah perlunya menambah jam operasional, karena banyak masyarakat yang bekerja pagi hari tidak bisa mengakses program ini. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang.

Kegiatan operasi pasar murah ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama lintas sektor. Perum Bulog memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Sementara itu, penyediaan telur, ayam potong, dan daging kerbau dilakukan melalui kerja sama dengan pemasok lokal. Dinas Perdagangan Kota Medan terlibat dalam pengawasan harga dan kualitas barang, memastikan tidak terjadi praktik curang selama pelaksanaan. Dinas Sosial membantu menyosialisasikan kegiatan ini kepada kelompok masyarakat penerima bantuan sosial. Tak ketinggalan, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara juga berpartisipasi dengan membuka layanan perbankan serta memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat yang datang ke lokasi pasar murah. Menurut Kusnandar (2022), sinergi antar lembaga dalam program sosial-ekonomi dapat meningkatkan efektivitas hingga 30%, dan hal ini terbukti dalam lancarnya pelaksanaan kegiatan ini.

Dari pengalaman ini, memperoleh pemahaman mendalam bahwa pengembangan masyarakat bukan sekadar teori, melainkan sebuah proses dinamis yang memerlukan empati, kerja sama, dan tindakan nyata. Melalui pendekatan COCD, belajar bahwa peran pekerja sosial bukanlah memberikan bantuan secara langsung, melainkan memfasilitasi masyarakat untuk mengenali dan memanfaatkan potensi mereka sendiri demi mencapai kesejahteraan. Strategi intervensi yang kami gunakan selama kegiatan ini adalah pendekatan direktif, di mana kami sebagai pendamping turut memberikan arahan kepada masyarakat agar program berjalan

dengan tertib dan efektif. Pendekatan ini sangat efektif untuk konteks masyarakat yang belum terbiasa dengan partisipasi aktif dalam program sosial.

Dampak Operasi Pasar Murah PT. Pos Indonesia: Antara Efektivitas Ekonomi dan Penguatan Sosial Masyarakat

Pelaksanaan operasi pasar murah oleh PT. Pos Indonesia di Medan pada bulan Ramadhan 2025 bukan sekadar kegiatan distribusi bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini telah menunjukkan dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga sosial, politik, dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kegiatan ini mencerminkan sinergi antara sektor pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan elemen masyarakat, yang bersatu dalam upaya menjawab tantangan krisis pangan musiman.

Salah satu dampak utama yang segera dirasakan masyarakat adalah peningkatan daya beli. Di tengah kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri, program ini hadir sebagai alternatif yang menjanjikan. Banyak masyarakat yang menyampaikan bahwa harga beras, minyak, gula, dan telur yang dijual dalam pasar murah jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Dengan harga yang lebih terjangkau, pendapatan yang sebelumnya hanya cukup untuk kebutuhan pangan dapat dialihkan sebagian ke kebutuhan lain seperti biaya pendidikan anak, layanan kesehatan, atau bahkan ditabung untuk kebutuhan mendesak. Efek domino dari peningkatan daya beli ini sangat penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga, terutama kelompok rentan seperti buruh harian, pedagang kecil, dan lansia.

Selaras dengan itu, program ini juga memiliki efek sistemik dalam menurunkan tekanan inflasi. Kehadiran bahan pokok murah di tengah masyarakat memengaruhi dinamika harga pasar. Ketika permintaan pasar terhadap produk komersial menurun akibat adanya alternatif dari pasar murah, pedagang di pasar umum terdorong untuk menurunkan harga agar tetap kompetitif. Dampak ini tidak hanya memperbaiki posisi konsumen tetapi juga mendorong mekanisme pasar untuk bergerak lebih sehat dan stabil. Hal ini sesuai dengan teori intervensi harga dalam ekonomi makro, di mana pemerintah atau lembaga publik dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan pasar saat fluktuasi terjadi.

Tidak kalah penting, program ini juga berdampak langsung dalam menekan beban biaya hidup masyarakat. Bagi banyak keluarga, harga pangan menjadi beban terbesar dalam pengeluaran bulanan. Ketika harga bahan pokok menjadi lebih murah, masyarakat merasa lebih leluasa dan tidak terlalu tertekan secara ekonomi. Program ini menjadi bentuk konkret dari perlindungan sosial yang dirancang agar

menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dalam jangka panjang, penghematan yang didapat dari program semacam ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui gizi yang lebih baik, pendidikan yang berkelanjutan, dan stabilitas emosional dalam keluarga. Dampak lain yang tidak kalah menarik adalah tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal. Pasar murah yang dilaksanakan di lokasi strategis seperti halaman Kantor Pos Medan dan area depan Lapangan Merdeka memicu keramaian yang secara otomatis meningkatkan transaksi di sekitar area tersebut. Pedagang kaki lima, warung makan, dan ojek daring mendapat manfaat dari kerumunan yang datang untuk berbelanja. Program ini memunculkan multiplier effect yang memperkuat struktur ekonomi mikro di sekitar lokasi kegiatan.

Tidak hanya dari sisi ekonomi, program ini juga membawa dampak sosial yang signifikan. Suasana antrean yang tertib, kebersamaan dalam mengakses layanan publik, hingga kerja sama masyarakat dalam menjaga ketertiban menunjukkan tumbuhnya kesadaran sosial. Antrean yang diatur berdasarkan RT/RW, giliran khusus untuk lansia, dan inisiatif saling membantu antara sesama pengunjung mencerminkan terbangunnya modal sosial yang kuat. Modal sosial ini, menurut Putnam dalam Hamdi (2023), merupakan kekuatan yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan berdaya dalam pembangunan komunitasnya.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat relasi antara masyarakat dan institusi negara. Citra PT. Pos Indonesia sebagai BUMN yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan. Kehadiran pegawai Pos, relawan mahasiswa, dan pendamping dari berbagai lembaga memperlihatkan bahwa negara hadir dalam bentuk nyata. Hubungan yang terbangun dalam konteks ini bukan hubungan transaksional semata, tetapi hubungan emosional yang menciptakan kepercayaan, rasa memiliki, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial lainnya.

Namun demikian, pelaksanaan program ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan stok. Pada minggu kedua pelaksanaan, beberapa bahan pokok seperti telur ayam dan ayam potong mengalami kelangkaan akibat permintaan yang tinggi. Kelangkaan ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang telah mengantre lama namun tidak mendapatkan produk yang mereka butuhkan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya manajemen stok dan prediksi permintaan yang lebih akurat dalam perencanaan program sosial berskala besar.

Tantangan lain muncul dari antrean panjang yang tidak bisa dihindari, terutama pada jam sibuk. Meski sudah diterapkan sistem antrean berdasarkan nomor dan dibantu oleh relawan, tetap saja terjadi penumpukan orang pada titik-titik tertentu. Ini menjadi tantangan logistik dan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian serius di masa depan. Solusi jangka panjang seperti sistem pemesanan online, penjadwalan berdasarkan wilayah domisili, atau penambahan titik distribusi dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan.

Dari sisi teknis, koordinasi logistik masih menjadi kendala tersendiri. Barang-barang seperti daging dan ayam potong memerlukan penyimpanan dalam suhu tertentu. Keterlambatan pengiriman dari pemasok menyebabkan gangguan dalam distribusi. Hal ini menandakan bahwa program semacam ini memerlukan dukungan infrastruktur logistik yang solid, termasuk cold storage, sistem pelacakan barang, dan mitra pengiriman yang andal. Selain itu, keterbatasan lokasi juga menjadi kritik yang cukup kuat. Dengan hanya satu titik pelaksanaan di pusat kota, masyarakat di daerah pinggiran seperti Medan Tuntungan atau Medan Labuhan kesulitan untuk menjangkau lokasi. Ongkos transportasi dan keterbatasan waktu menjadi hambatan tersendiri bagi kelompok masyarakat marginal. Untuk itu, pengembangan jaringan distribusi ke wilayah lain menjadi solusi strategis dalam meningkatkan inklusivitas program.

Melihat potensi besar yang dimiliki program ini, evaluasi terhadap keberlanjutannya menjadi penting. PT. Pos Indonesia sebagai penyelenggara memiliki peluang besar untuk memperluas program ini ke seluruh pelosok negeri dengan memanfaatkan jaringan kantor pos yang tersebar luas. Kantor pos di kecamatan dan desa dapat dijadikan sebagai titik distribusi bahan pokok murah secara berkala. Ini akan menjadikan program lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, diversifikasi komoditas juga menjadi opsi pengembangan yang menarik. Program ini tidak harus terbatas pada beras, minyak, dan gula. Kebutuhan lain seperti perlengkapan sekolah, alat kebersihan rumah tangga, atau bahkan sembako khusus untuk kelompok lansia dan difabel bisa dijadikan bagian dari operasi pasar murah tematik. Dengan pendekatan ini, masyarakat merasa diperhatikan secara lebih personal dan spesifik.

Kemajuan teknologi juga harus dimanfaatkan secara optimal. PT. Pos Indonesia sudah memiliki platform digital seperti POSPAY yang dapat diintegrasikan ke dalam program pasar murah. Pemesanan barang secara online, jadwal pengambilan, pembayaran digital, hingga sistem penilaian konsumen dapat dijalankan dengan satu aplikasi. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi, tetapi juga

mendekatkan teknologi kepada masyarakat secara praktis. Keberlanjutan program ini juga sangat mungkin diwujudkan melalui kemitraan dengan pelaku UMKM lokal. Dalam jangka panjang, melibatkan UMKM sebagai penyedia barang dapat memberdayakan ekonomi lokal sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Ini juga membuka peluang kerja sama lintas sektor yang memperkaya inovasi sosial di tingkat komunitas.

Prasetyono (2023) menyatakan bahwa keberlanjutan program sosial ekonomi hanya dapat dicapai jika program tersebut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat (Luqmania et al., 2022). Dalam konteks ini, PT. Pos Indonesia telah memulai langkah yang baik, namun pengembangan lebih lanjut harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan multipihak. Sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial yang terlibat langsung dalam program ini, pengalaman ini memperkaya pemahaman terhadap penerapan metode intervensi *Community Organization and Community Development (COCD)*. Melalui pelibatan, penilaian kebutuhan, perencanaan bersama, pelaksanaan kolaboratif, dan evaluasi partisipatif, belajar bahwa perubahan sosial hanya bisa terjadi jika masyarakat menjadi aktor utama, bukan sekadar objek penerima manfaat. Operasi pasar murah PT. Pos Indonesia tidak hanya mendistribusikan barang, tetapi juga menanamkan nilai solidaritas, partisipasi, dan kemandirian dalam kehidupan sosial masyarakat. Inilah wajah pembangunan sosial yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Operasi pasar murah yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia di Medan selama bulan Ramadhan 2025 merupakan implementasi nyata dari konsep *welfare state* dimana negara, melalui BUMN, berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya berhasil membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga berkontribusi pada stabilisasi harga pangan secara umum di pasaran. Penerapan metode intervensi *COCD (Community Organization and Community Development)* melalui keterlibatan relawan mahasiswa telah memperkuat dimensi pemberdayaan sosial dari program ini, menciptakan ruang partisipasi aktif masyarakat dan membangun kemandirian dalam mengelola akses terhadap kebutuhan pokok.

Pendekatan *COCD* dengan tahapan *engagement, assessment, planning, implementation, evaluation, dan termination/referral* telah memungkinkan program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai medium penguatan modal sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari

terbentuknya inisiatif swadaya seperti sistem antrian mandiri berbasis RT/RW dan mekanisme prioritas bagi kelompok rentan. Meski demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan stok, antrian panjang, koordinasi logistik, dan jangkauan yang terbatas. Kendala-kendala ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program serupa di masa mendatang.

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain perluasan jangkauan ke wilayah pinggiran kota dan pedesaan, diversifikasi komoditas yang ditawarkan, integrasi dengan layanan digital PT. Pos Indonesia, dan pengembangan kemitraan dengan UMKM lokal sebagai pemasok. Selain itu, penguatan metode COCD melalui pelatihan fasilitator komunitas dari kalangan masyarakat sendiri dapat memastikan keberlanjutan dampak positif program setelah kegiatan operasi pasar murah berakhir. Dengan perbaikan dan pengembangan tersebut, operasi pasar murah PT. Pos Indonesia berpotensi menjadi model pelayanan publik yang efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan membangun ketahanan sosial-ekonomi komunitas.

REFERENCES

- Apriani, F., Luthfi, A., Febrianto, B., & Junaidy, J. (2022). Penerimaan Publik dalam Keberhasilan Mitigasi Bencana Covid-19 di Kota Samarinda. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 130–156.
- Dewi, S. A. (2023). *Manajemen Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melalui program Marching Band Locomotive*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1.
- Luqmania, D., Sunani, A., Septiani, A., Riyanto, F. A. D., Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2022). Mas klimis (masyarakat peduli iklim yang harmonis) kendaraan pt pjb up gresik dalam mewujudkan tujuan sustainable development goals (sdgs). *Share: Social Work Journal*, 12(1), 45–56.
- Sjoraida, D. F., Hasyir, D. A., Bakti, I., Setianti, Y., & Wiyatna, M. F. (2025). Pelatihan Pengukuran Dampak Sosial Metode SROI Bagi Pegawai Direktorat TJSL PT. Pos Indonesia (Persero). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(2), 497–503.
- Sunardi, S., Ikfilana, R., & Bustomi, A. I. A. (2022). Dampak Kenaikan Harga Barang terhadap Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Hi-Tech (Humanity, Health, Technology)*, 1(1).